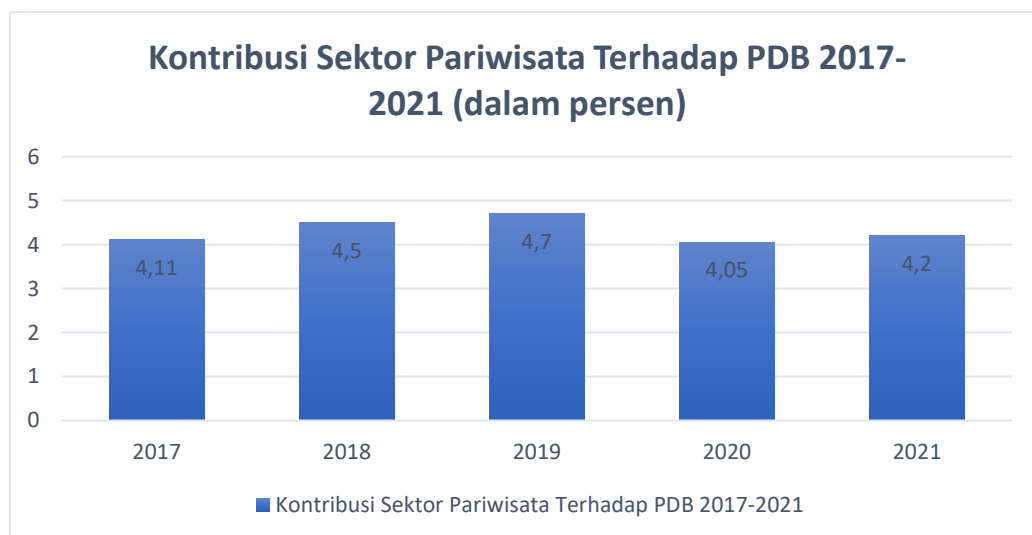


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan di sektor pariwisata membuat sektor pariwisata mempunyai peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan ekspor, pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha, pengembangan usaha dan infrastruktur, serta meningkatkan taraf hidup. Sektor pariwisata ini dinilai dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, pariwisata adalah salah satu sumber devisa terbesar dalam suatu negara, bahkan sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah khususnya di negara berkembang banyak yang menggunakan sektor pariwisata untuk meningkatkan PDB daerah. Berikut ini merupakan bukti bahwa setiap tahunnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif mengalami peningkatan.



Gambar 1.1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB 2017-2021

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB yang relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 kontribusinya terhadap PDB menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 4,7% menjadi hanya sebesar 4,05%. Menurunnya tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB tersebut disebabkan oleh adanya pandemi di Indonesia (lihat gambar 1.1).

Objek wisata adalah salah satu daya tarik alam yang dimiliki Indonesia yang harus dibanggakan dan dijaga. Setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khasnya tersendiri baik dilihat dari segi keindahannya maupun adat istiadatnya yang dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari adanya berbagai pariwisata di daerah ini. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pariwisata yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan suatu perencanaan yang baik. Bagi pemerintah dan masyarakat sekitar tempat wisata, pengelolaan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah menjadi salah satu asset daerah.

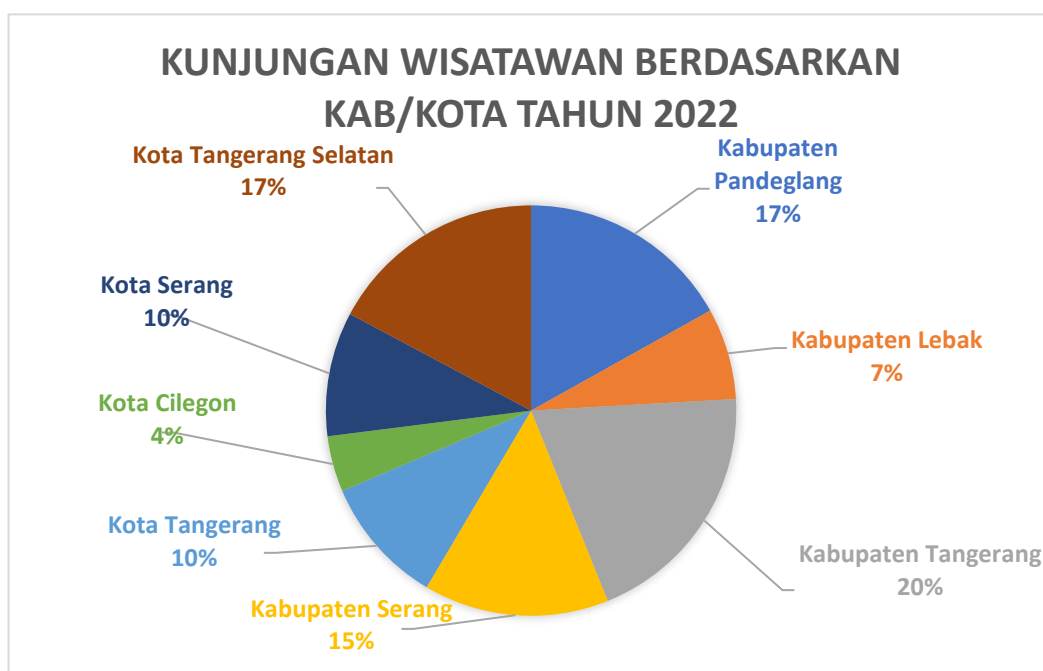
Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem desentralisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang memberikan pemahaman bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sejak diberlakukannya sistem ini, setiap daerah di Indonesia memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengembangkan daerah mereka sendiri sesuai dengan potensinya. Hal ini memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah karena dapat menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan dan memajukan daerah mereka sehingga mereka dapat berdiri sendiri dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Sistem ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga Provinsi Banten.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan termasuk dalam provinsi termuda yang sebelumnya masuk ke dalam bagian wilayah Jawa Barat. Provinsi Banten mempunyai objek wisata alam dan budaya yang sangat beragam dan cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Banten menjadi pintu gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera karena berada di ujung barat Pulau Jawa. Hal ini membuat Provinsi Banten mempunyai peluang yang besar dalam sektor pariwisata dan kebudayaan. Secara keseluruhan, wilayah Provinsi Banten memiliki empat kabupaten dan empat kota, dimana masing-masing daerahnya mempunyai potensi pariwisata yang patut untuk dikembangkan.

Salah satu wilayah di Provinsi Banten yang mempunyai banyak potensi untuk menarik wisatawan lokal atau mancanegara adalah Kabupaten Tangerang. Hal ini karena Kabupaten Tangerang menjadi wilayah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di Provinsi Banten. Jumlah kunjungan wisatawan ke

Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai 2.369.556 orang atau 19,8% dari seluruh jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Banten, dengan rincian jumlah wisatawan lokal sebanyak 2.356.769 orang atau sekitar 99,5% dan wisatawan mancanegara sebanyak 12.787 orang atau sekitar 0,5%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak di Provinsi Banten (lihat gambar 1.2).



Gambar 1.2 Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Kab/Kota Tahun 2022

Sumber: ExcitingBanten.id

Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah 959,61 km² atau 9,93% dari luas Provinsi Banten, yang memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahannya berada di Tigaraksa. Kabupaten Tangerang mempunyai batas wilayah bagian utara yaitu berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak dan bagian timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan,

Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat (Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2023). Berdasarkan letak geografisnya yang cukup strategis yakni berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan ibukota Indonesia dan dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat Kabupaten Tangerang menjadi kawasan strategis dalam sektor industri pariwisata.

Kondisi geografis Kabupaten Tangerang menghasilkan beragam potensi tempat wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata buatan yang dapat dikunjungi di wilayah tersebut. Salah satu tempat wisata populer di Kabupaten Tangerang adalah objek wisata pantai. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Tangerang dimana daerah utaranya merupakan daerah pantai. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, kawasan pantai yang berpotensi di Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu Tanjung Pasir yang terletak di Teluk Naga, Tanjung Kait yang terletak di Kecamatan Mauk, Dadap yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Muara Ujung. Pantai Tanjung Kait adalah salah satu dari banyak pantai di Kabupaten Tangerang yang tidak hanya memiliki objek wisata pantai. Pantai ini juga memiliki objek wisata lain seperti sejarah, budaya, wisata kuliner, dan aktivitas rekreasi seperti pemancingan. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif di Pantai Tanjung Kait sangat penting untuk dilakukan agar jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Kait maupun ke seluruh Kabupaten Tangerang dapat mengalami peningkatan.

Pantai Tanjung Kait terletak di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Pantai Tanjung Kait menjadi sumber pendapatan bagi

masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Pantai Tanjung Kait memiliki banyak potensi wisata, termasuk pemandangan pantai dan laut yang indah, rumah makan ranggon, dermaga perahu, tempat berenang, dan tempat pemancingan. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya dan didukung oleh pernyataan dari pihak Pokdarwis Pantai Tanjung Kait serta Pemerintah Desa Tanjung Anom bahwa belakangan ini Pantai Tanjung Kait mengalami sepi pengunjung. Sementara itu, kunjungan wisatawan sebenarnya sangat memiliki peluang positif bagi masyarakat sekitar untuk menjadi pelaku wisata yang aktif dengan kegiatan ekonomi serta juga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang kemudian dapat dikembalikan kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur pendukung (NC Irawan, dkk, 2022).

Sepinya kunjungan wisatawan ke Pantai Tanjung Kait disebabkan karena kondisi pantai yang kumuh dan kotor, kawasan sekitar pantai yang tidak terawat, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebersihan, tata kelola dan keindahan di Pantai Tanjung Kait kurang baik. Ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pengunjung Pantai Tanjung Kait, yaitu:

“Banyak sampah berserakan, tempat-tempat makannya sepi, kaya kurang diminati pengunjung gitu. Nggak dikelola dengan baik kalo menurut saya mah, asal aja gitu, jadi sepi”. (<https://www.bantenekspose.com/2019/07/mahalnya-biaya-tarif-masuk-pantai.htm>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari pengunjung lain yang menyatakan bahwa selain saat hari raya idul fitri, Pantai Tanjung Kait mengalami sepi pengunjung dan terdapat banyak sampah di kawasan sekitar pantainya.

“Pantainya sepi pada hari biasa maupun akhir pekan. Hanya ramai saat hari raya lebaran. Terkadang banyak sampah yg terdampar di pinggir pantai. pengelola harus lebih peduli terhadap kebersihan pantai. Agar lebih menarik pengunjung. Untuk mendongkrak ekonomi warga sekitar”. (<https://www.pantaipedia.com/pantai-tanjung-kait/> , diakses pada tanggal 27 Maret 2024).

Selain itu, masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pungutan liar kepada para pengunjung. Pungutan yang dikenakan ke para pengunjung untuk masuk ke Pantai Tanjung Kait pun terbilang cukup mahal, bahkan mahalny tarif yang dikenakan tersebut ada yang tidak disertai dengan sebuah karcis atau tiket masuk, hal tersebut karena terdapat banyak pintu masuk ke tempat wisata Pantai Tanjung Kait. Mahalnya pungutan liar di Pantai Tanjung Kait ini mulai dikeluhkan oleh para pengunjung, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengunjung Pantai Tanjung Kait.

“Pas mau masuk tiba-tiba ada sekumpulan orang minta uang buat bayar masuknya Rp. 20.000, saya tawar 10.000 ga mau”. (<https://www.bantenekspose.com/2019/07/mahalnya-biaya-tarif-masuk-pantai.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2023).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan lain yang disampaikan oleh pengunjung Pantai Tanjung Kait.

“Susah ngebedain antara sampah dan pungli karna sama banyaknya. Harusnya ada tindakan dr aparat yg berwenang terutama soal pungli yg sdh terjadi bertahun2. Warga yg tdnya mau rekreasi dibuat ga nyaman krn pungli, mending kl pantainya bagus, selain pungli jg banyak sampah dan bau”. (https://www.pantaipedia.com/pantai-tanjung-kait/#google_vignette, diakses pada tanggal 2 November 2023).

Adanya pungutan liar ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Tanjung Kait masih kurang. Selain itu, juga belum terdapat penerangan jalan umum (PJU) di jalan sekitar Pantai Tanjung Kait, hal ini

mengakibatkan pengunjung kesulitan dalam perjalanan pulang saat malam hari. Petunjuk arah menuju lokasi Pantai Tanjung kait pun masih sedikit, hal ini juga akan menyulitkan pengunjung untuk sampai ke lokasi Pantai Tanjung Kait. Di samping itu, promosi area pantai juga masih rendah dalam menarik minat pengunjung, terutama di area kuliner, yang mana ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku usaha wisata.

Untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan potensinya sebagai objek wisata, Pantai Tanjung Kait tentu sangat membutuhkan pengelolaan yang baik. Dengan berbagai permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Kait saat ini, tentu tidak dapat diatasi oleh satu lembaga saja, harus ada kerja sama yang dilakukan antara lembaga pemerintahan, kelompok masyarakat dan juga pihak swasta. Hal tersebut karena adanya keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada, baik itu keterbatasan dalam sumber daya manusia, sumber daya materi, sumber daya infrastruktur maupun jaringan.

Kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan publik disebut dengan *Collaborative Governance*. Menurut Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suitri, 2019), *collaborative governance* adalah kerja sama yang dijalankan oleh beberapa instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung dalam menentukan suatu keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang memiliki keterbatasan sumber

daya dalam melakukan hal tersebut, sehingga mereka berupaya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak atau yang disebut dengan *collaborative governance*, karena menyadari bahwa hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Dalam kerja sama yang dilakukan untuk mengelola Pantai Tanjung Kait, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang berdasarkan Perbup No 108 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 1, berperan dalam memberikan pelatihan, pembinaan dan melakukan monitoring terhadap kegiatan kelompok sadar wisata. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pokdarwis Pantai Tanjung Kait, kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh Disporabudpar Kabupaten Tangerang ini tidak dilakukan secara rutin meskipun hal tersebut masih terus dilaksanakan. Disporabudpar Kabupaten Tangerang berdasarkan Perbup No 108 Tahun 2016 Pasal 17 ayat 3 juga mempunyai tugas yaitu mempromosikan pariwisata. Dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini, Disporabudpar Kabupaten Tangerang belum melakukan promosi secara intens baik melalui media sosial maupun *website* resmi. Pemerintah desa setempat dalam hal ini Pemerintah Desa Tanjung Anom juga terlibat dalam kerja sama yang dilakukan. Dalam kerja sama ini, pemerintah desa berperan dalam hal perizinan Pantai Tanjung Kait yang berada di wilayah Desa Tanjung Anom.

Adapun pengelolaan Pantai Tanjung Kait ini dilakukan secara langsung oleh kelompok masyarakat. Dimana pengelolaan tersebut dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun, dalam pelaksanaannya sumber daya manusia

yang ada masih memiliki kualitas yang rendah, yang mana masyarakat belum memahami akan kebutuhan dan cara mengelola Pantai Tanjung Kait secara optimal. Kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan Pantai Tanjung Kait juga melibatkan pihak swasta yaitu PT PLN UID Banten melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli. PT PLN UID Banten dalam kerja sama ini memberikan kontribusinya yaitu berupa hal-hal yang bersifat materi untuk pembuatan *icon* wisata Pantai Tanjung Kait dan membantu UMKM lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait banyaknya permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Kait dan adanya keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga mereka melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengatasi hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak dari berbagai aktor dalam upaya mengelola Pantai Tanjung Kait guna memperbaiki kondisi Pantai Tanjung Kait, yang mana hal tersebut dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?
2. Apa faktor yang mendorong atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dengan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu meningkatkan wawasan dan pengalaman yang lebih luas bagi penulis sehingga lebih memahami mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata.

b. Bagi Lembaga Terkait

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi masukan informasi dan sarana evaluasi bagi Disporabudpar dan Pokdarwis dalam pengelolaan pariwisata.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu mencakup beberapa penelitian sebelumnya pernah diteliti dan mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan isu yang akan diteliti yaitu tentang proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata. Berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa artikel sebagai ulasan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
1.	Molla, Y, dkk. (2021) <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat	Mengamati proses dan faktor-faktor <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan kampung wisata Praiijing di desa Tebara kecamatan kota Waikabubak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) terkait <i>Collaborative Governance</i> , yang terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: 1. Kondisi Awal 2. Desain Kelembagaan 3. Kepemimpinan Fasilitatif 4. Proses Kolaborasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Kampung Wisata Praiijing belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, ini terlihat dari beberapa aspek, termasuk kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang telah menghasilkan model kolaborasi di Kampung Wisata Praiijing. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh beragam faktor internal dan eksternal yang berperan dalam pengelolaan Kampung Wisata Praiijing di lapangan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek budaya, lembaga pengelola, alokasi anggaran, letak geografis, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya pengemasan yang memadai untuk atraksi budaya, serta kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, isu-isu seperti aksesibilitas wilayah, penggunaan teknologi, persaingan dengan objek wisata sejenis, dan

					perubahan nilai-nilai budaya juga menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di masa depan.
2.	Tilano, F. A & Sri Suwitri. (2019) <i>Collaborative Governance</i> dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang	Mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi <i>stakeholders</i> dalam keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam kolaborasi.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka.	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) terkait model <i>Collaborative Governance</i> , yang terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: 1. Kondisi Awal 2. Kepemimpinan Fasilitatif 3. Desain Institusional 4. Proses Kolaborasi Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh De Seve (dalam Sudarmo, 2011:110-116) terkait indikator untuk menilai keberhasilan kolaborasi, yaitu: 1. <i>Networked structure</i> 2. <i>Commitment to common purpose</i> 3. <i>Trust among the participants</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat dari aspek kondisi awal, desain institusional, dan proses kolaboratif dianggap telah berjalan dengan baik. Namun, kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini belum beroperasi secara optimal. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Forum LLAJ yang terjadi secara situasional dan tidak ada pedoman yang mengharuskan pelaksanaan Forum LLAJ setiap tahun. Hal ini mengakibatkan pemberdayaan dalam kerjasama tidak maksimal. Adapun faktor-faktor yang mendorong kolaborasi meliputi <i>networked structure, commitment to a common purpose, distributive accountability/responsibility, dan information sharing</i> . Di sisi lain, faktor yang menghambat hanya <i>access to</i>

				<p>4. <i>Governance</i> 5. <i>Access to authority</i> 6. <i>Distributive accountability/ responsibility</i> 7. <i>Information sharing</i> 8. <i>Access to resources</i></p>	<p><i>resource</i>, yaitu terkait Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi standar kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi. Selain itu, kendala serius juga muncul dalam hal sumber keuangan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh setiap instansi.</p>
3.	<p>Utami, A. D. M, dkk. (2021)</p> <p><i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang</p>	<p>Mengetahui analisis <i>collaborative governance</i> dan faktor yang menunjang keberhasilannya dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dokumen terkait dan materi audio visual.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) terkait model <i>Collaborative Governance</i>, yang terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Awal 2. Kepemimpinan Fasilitatif 3. Desain Institusional 4. Proses Kolaborasi <p>Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh De Seve (dalam Mutiarawati & Sudarmo, 2017) terkait indikator untuk menilai keberhasilan kolaborasi, yaitu:</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat diidentifikasi melalui analisis model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash. Beberapa kendala mencakup kurangnya kejelasan dalam peraturan, kurangnya pemahaman bersama mengenai visi dan misi, serta tingkat komitmen dan partisipasi yang masih kurang optimal. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam <i>collaborative governance</i>, termasuk tingginya tingkat kepercayaan, keberadaan peraturan yang tepat, pembagian tanggung jawab yang jelas, berbagi informasi, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator yang belum</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Networked structure</i> 2. <i>Commitment to common purpose</i> 3. <i>Trust among the participants</i> 4. <i>Governance</i> 5. <i>Access to authority</i> 6. <i>Distributive accountability/responsibility</i> 7. <i>Information sharing</i> 8. <i>Access to resources</i> 	terpenuhi, termasuk masalah dalam struktur jaringan, tingkat komitmen, dan kejelasan tata kelola yang perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan efektivitas <i>collaborative governance</i> .
4.	Akbar, R, dkk. (2022) <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang	Menelaah lebih dalam bagaimana pelaksanaan <i>collaborative governance</i> beserta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi. dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam.	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> dari Ansell & Gash (2008) yang menjabarkan tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi, yakni sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Face-to-Face Dialogue</i> 2. <i>Trust Building</i> 3. <i>Commitment to the Process</i> 4. <i>Shared Understanding</i> 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dimulai dengan komunikasi intensif antara aktor melalui dialog tatap muka. Selain itu, faktor-faktor seperti kondisi awal, desain institusional, dan kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mendukung dalam kolaborasi yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah.

5.	Alamsyah, D, dkk. (2019) <i>Collaborative Governance</i> dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara	Mengetahui <i>collaborative governance</i> dalam mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> dari Ansell & Gash (2008) yang menjabarkan tahapan-tahapan dalam proses kolaborasi, yakni sebagai berikut: 1. <i>Face-to-Face Dialogue</i> 2. <i>Trust Building</i> 3. <i>Commitment to the Process</i> 4. <i>Shared Understanding</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara telah berjalan dengan baik. Proses <i>collaborative governance</i> melibatkan beberapa tahapan, yaitu: 1. <i>Face-to-Face Dialogue</i> , dalam pengembangan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pengelola. Mereka melakukan pertemuan langsung melalui forum musyawarah. 2. <i>Trust building</i> , dengan mengadakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi wisata. 3. <i>Commitment to process</i> , dalam pengembangan wisata edukasi melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam proses pengembangannya. 4. <i>Share understanding</i> , untuk mengevaluasi sejauh mana proses kolaborasi telah berjalan dalam pengembangan wisata edukasi. Ini melibatkan pembentukan forum
----	--	--	---	---	--

					pembinaan bagi pengelola, penyediaan pengawas atau pamong wisata untuk meningkatkan keamanan wisata edukasi, serta promosi objek wisata.
6.	Kim, H. <i>et al.</i> (2023) <i>Collaborative governance and conflict management in cultural heritage-led regeneration projects: The case of urban Korea</i>	Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konflik dan pengelolaannya di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek regenerasi yang dipilih.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini mengiuti arahan penelitian masa depan yang disarankan oleh Bingham (2011), penelitian ini menggunakan kerangka integratif tata kelola kolaboratif (yang menggabungkan proses berurutan dari kondisi awal, kondisi yang muncul, situasi tindakan, interaksi, dan hasil) untuk mengidentifikasi tahapan konflik dan pengelolaannya dalam proses regenerasi perkotaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan tata kelola kolaboratif dan interaksi para pemangku kepentingan dapat memainkan peran penting dalam mengelola konflik. Keselarasan antara pelestarian warisan budaya dan regenerasi (pembangunan kembali) dipupuk melalui pertimbangan keadilan bagi para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sektor swasta mungkin lebih memilih manfaat dari proyek pembangunan kembali yang dapat menimbulkan konflik dibandingkan pelestarian barang publik. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kembali apakah proyek regenerasi dapat meningkatkan status daerah tertinggal.
7.	Gong, Y. <i>et al.</i> (2023)	Mengeksplorasi tata kelola kolaboratif yang dipimpin oleh para perencana	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan	Penelitian ini menggunakan pembagian yang dikemukakan oleh Roy (2015) antara hubungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa bentuk perkotaan dan peningkatan besar ruang terbuka di Yangji yang dibangun kembali

	<i>Planner-led collaborative governance and the urban form of urban villages in redevelopment: The case of Yangji Village in Guangzhou, China</i>	dalam membangun kembali bentuk perkotaan Desa Yangji, yang telah menghasilkan lebih banyak ruang publik terbuka.	mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi serta dari arsip desa.	sekeliling meja dan di luar dialog kerjasama, kritik tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yakni konteks, dinamika, dan pendorong.	merupakan hasil dari tata kelola kolaboratif yang dipimpin oleh perencana yang terutama didorong oleh upaya perencana kota dan pemangku kepentingan sesuai dengan urbanisasi. Berdasarkan kepercayaan awal mereka, tiga pemangku kepentingan—pemerintah daerah, YEA, dan pengembang real estat—memulai perencanaan dan pembangunan kembali Yangji. Peran utama para perencana dalam kolaborasi dipastikan melalui penggunaan strategis dukungan negara dan pengetahuan profesional serta advokasi mereka terhadap kepentingan publik.
8.	Sundqvist-Andberg, H & Maria Akerman. (2022) <i>Collaborative governance as a means of navigating the uncertainties of sustainability</i>	Memahami bagaimana ambiguitas kelembagaan, yang disebabkan oleh keterkaitan antara kebijakan limbah dan pangan, membentuk kolaborasi dalam dua jenis inisiatif	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini menggunakan teori <i>collaborative governance</i> dan musyawarah dari Ansell & Gash 2007 (dalam Hajer & Wagenaar 2003), teori Motivasi untuk berkolaborasi dari Gray dan Purdy (2018) dan teori Mengelola ketidakpastian dan ambiguitas kelembagaan dari (Pellizzoni 2001,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narasi keberlanjutan yang ada membentuk pertimbangan yang terbentuk dalam proses kolaboratif Peta Jalan Plastik dan Komitmen Efisiensi Material. Namun, narasi tersebut belum tentu tetap, seperti yang ditunjukkan oleh evolusi narasi kejahatan plastik selama negosiasi Peta Jalan Plastik. Pergeseran narasi seperti ini penting karena menunjukkan bahwa

	<p><i>transformations: The case of Finnish food packaging</i></p>	<p>tata kelola kolaboratif yang menangani pengemasan makanan di Finlandia – Peta Jalan Plastik dan Komitmen Efisiensi Bahan untuk industri makanan.</p>		<p>Funtowicz & Ravetz 1993, Hajer 2003).</p>	<p>musyawarah yang tercipta dalam inisiatif tata kelola kolaboratif layak untuk dilakukan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat target dan bahasa bersama serta memperluas pemahaman mereka mengenai keberlanjutan kemasan pangan sehingga dapat mendukung mereka dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi pemangku kepentingan dapat berubah selama proses kolaboratif seiring dengan perubahan dalam suasana musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa selain motivasi yang jelas, ambiguitas kelembagaan terkait isu keberlanjutan yang kontroversial menciptakan peluang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan dampak pada narasi kebijakan yang membentuk pertimbangan tersebut, dan berpotensi untuk secara aktif mendefinisikan kembali peran mereka dalam transformasi dan mengambil tindakan.</p>
--	---	---	--	--	--

9.	<p>Ullah, I & Dong-Young Kim (2020)</p> <p><i>A Model of Collaborative Governance for Community-based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries</i></p>	<p>Menguraikan model tata kelola umum dengan membingkai CBTH sebagai bentuk tata kelola kolaboratif dan dengan melakukan studi meta-sintetik terhadap literatur yang ada mengenai pengelolaan sumber daya bersama (CPRM), CBC, dan program CBTH.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini mengimplementasikan model tata kelola kolaboratif Ansel & Gash (2008) yang mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses dan hasil kolaboratif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa terkait kondisi awal untuk melahirkan CBTH di negara-negara berkembang, kami mengusulkan bahwa kegagalan kebijakan konservasi konvensional yang bersifat top-down, persepsi masyarakat lokal tentang potensi manfaat dari CBTH, dan keberadaan kepemimpinan fasilitatif, seperti LSM konservasi lokal atau internasional akan memainkan peran penting dalam memulai CBTH, bahkan di tengah konflik, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kurangnya kepercayaan. Dalam proses kolaboratif, pertemuan tatap muka yang konstruktif dan membangun kepercayaan serta menghasilkan hasil antara diidentifikasi sebagai faktor penting dalam membangun momentum untuk keberhasilan hasil CBTH.</p>
10.	<p>Sedlacek, S, et al. (2020)</p> <p><i>Collaborative governance in energy regions e</i></p>	<p>Mengidentifikasi dan memahami bagaimana tata kelola kolaboratif perlu diatur untuk mendorong transisi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis transisi yang dikemukakan oleh Loorbach et al. (2017) dan karakteristik pemangku kepentingan untuk</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses identifikasi pemangku kepentingan yang dimoderasi membantu mengintegrasikan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses membangun aliansi yang kuat yang</p>

	<i>Experiences from an Austrian region</i>	energi di wilayah energi yang diteliti.	penelitian pustaka, wawancara, kunjungan lapangan, lokakarya pemangku kepentingan, dan observasi partisipan.	wilayah studi kasus Pinzgau menurut Schmeer (1999).	membantu menghindari asimetri informasi dan mendeteksi struktur yang bergantung pada jalur dan penguncian yang sistemik. Dukungan eksternal juga membantu mengidentifikasi aktor-aktor relevan di luar kelompok 'tersangka biasa'. Salah satu pembelajaran yang dapat diambil adalah membangun struktur kelembagaan yang mendukung sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan yang kurang berkomitmen untuk mengubah pola pikir mereka dan menciptakan kepentingan bersama.
--	--	---	--	---	--

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi publik mempunyai definisi yang dimana administrasi berasal dari kata latin yaitu *Ad* dan *ministrare* (administration) berartikan pemberi bantuan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Dari definisi tersebut, terdapat dua pengertian administrasi secara sempit ataupun luas. Pengertian administrasi secara sempit dapat didefinisikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan surat-menyurat, agenda, pembukuan ringan, dan pencatatan. Sedangkan, secara luas administrasi didefinisikan sebagai proses kerja sama yang dilakukan oleh dua individu atau kelompok untuk meraih target tertentu. Sementara itu, publik memiliki pengertian yaitu masyarakat umum dan negara yang berasal dari bahasa inggris (*public*). Maka dari itu, administrasi publik dimaknai secara luas sehingga banyak para ahli yang mendefinisikan dari sudut pandang masing-masing yang berbeda tetapi inti pengertiannya sama.

Seperti sudut pandang Chander dan Plano (dalam Keban, 2014:3), administrasi publik diistilahkan sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan staff publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan serta mengatur keputusan-keputusan yang bersifat publik. Nigro dan Nigro (dalam Sodikin, 2015:5), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah sebuah kerja sama kelompok di lingkungan pemerintahan dimana memiliki peran yang sangat krusial dalam merumuskan kebijakan negara, dengan demikian termasuk bagian dari proses politik. Dari pandangan tersebut dan beberapa pernyataan ahli lainnya, administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah suatu proses kerja sama yang dijalankan oleh beberapa individu dan lembaga dalam menjalankan fungsi

pemerintahan untuk meraih tujuan awal secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara memadai.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Perubahan paradigma yang digunakan dalam pemahaman dan pengembangan suatu disiplin ilmu dapat menunjukkan perkembangan disiplin ilmu tersebut. Paradigma memaparkan kerangka konseptual yang digunakan dari beberapa ahli dalam menjelaskan situasi dan kondisi dalam perkembangan suatu sudut pandang ilmu pengetahuan. Paradigma adalah suatu perspektif, pendekatan dan prinsip dalam menghadapi suatu isu tertentu, yang diyakini oleh komunitas ilmiah pada masa tertentu. Adapun perkembangan paradigma administrasi publik yang disampaikan oleh Nicholas Henry dalam Keban (2008:31), yaitu digambarkan sebagai berikut.

Paradigma pertama (1900-1926) yaitu paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow sebagai tokoh dari paradigma ini mengatakan bahwa politik harus fokus pada pembuatan kebijakan yang sejalan dengan keinginan rakyat, sedangkan administrasi bertanggung jawab pada implementasi dari kebijakan tersebut. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi harus bersifat bebas nilai, dengan tujuan mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dalam birokrasi pemerintah. Akan tetapi, aspek yang ditekankan dalam paradigma ini hanya “*locus*” saja dan kurang membahas aspek fokus secara menyeluruh.

Paradigma kedua (1927-1937) yaitu Prinsip-Prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick & Urwick adalah tokoh dalam paradigma ini yang mempublikasikan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dicantumkan dalam POSDCORB atau *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting* yang dianggap sebagai prinsip yang bersifat global. Paradigma ini berbeda dengan paradigma pertama yaitu dalam hal lokus dan fokus administrasi publik. Pada paradigma kedua, fokusnya adalah pada fungsi dan prinsip manajemen dalam administrasi publik, sedangkan pemaparan lokusnya tidak pernah dijelaskan secara baik karena diasumsikan bahwa prinsip-prinsip diatas dapat legal di berbagai konteks.

Paradigma ketiga (1950-1970) yaitu paradigma Adminisrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Dalam paradigma ketiga ini terjadi perdebatan antara pandangan tentang administrasi yang bebas nilai dan politik yang sarat nilai. Kedua argumen ini pada kenyataannya sama-sama berlaku. Paradigma ketiga inilah yang selanjutnya membuat administrasi publik sebagai ilmu politik, yang mana birokrasi pemerintahan menjadi lokusnya dan karena terdapat banyak kekurangan dalam prinsip-prinsip administrasi publik maka fokusnya bersifat abstrak.

Paradigma keempat (1956-1970) yaitu Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Prinsip-prinsip yang sudah dikenal sebelumnya hanya diperluas dalam paradigma keempat ini. Paradigma keempat ini memfokuskan pada perilaku organisasi, analisis manajemen, serta implementasi teknologi yang sudah modern seperti analisis sistem, riset operasi, metode kuantitatif dan sebagainya. Terdapat

dua arah pengembangan di dalamnya yaitu pada ilmu administrasi secara asli dengan dorongan disiplin psikologi sosial dan juga pada orientasi kebijakan publik. Fokus yang ditekankan dalam paradigma keempat yaitu dinyatakan fleksibel karena dapat disesuaikan dengan lingkup administrasi publik, sehingga menjadi lebih abstrak dalam lokusnya.

Paradigma kelima (1970-sekarang) yaitu paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Dimana titik fokus dan lokusnya ditetapkan dengan jelas. Fokusnya adalah pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah pada berbagai hambatan dan urgensi publik.

Paradigma keenam (1990-sekarang) yaitu paradigma *Governance*. Paradigma ini menjelaskan mengenai cara agar negara dapat melayani masyarakat secara baik yang bertujuan agar kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. Paradigma *Governance* ini membenahi berbagai masalah publik seperti kesamarataan, kejelasan, keikutsertaan dan keterwakilan. Unsur-unsur yang terlibat dalam paradigma ini mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

United Nations Development Programme (UNDP) memberikan pengertian *governance* yakni sebagai implementasi kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah suatu negara. Ini merupakan suatu sistem yang kompleks, melibatkan proses, relasi dan institusi, dimana masyarakat dan kelompok-kelompok mengartikulasikan urgensi mereka, melaksanakan hak dan kewajibannya serta memutus selisih di antara mereka (Haris, 2019). Di samping itu, *Canadian Institute on Governance* menekankan bahwa *governance* juga

menyangkut mengenai aspek kebijakan tidak hanya aspek kekuasaan. Ini terdiri dari tradisi, lembaga, dan proses yang menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan, warga negara ikut berpartisipasi, dan ketetapan yang dibuat mengenai isu-isu publik. Sejalan dengan *Canadian Institute on Governance*, *Governance International UK* menyatakan bahwa *governance* merupakan cara dimana para *stakeholders* saling berinteraksi antara satu sama lain untuk mempengaruhi hasil dari suatu kebijakan.

Tony Bovaird (dalam Haris, 2019) mengemukakan pendapatnya terkait *governance* yang menitikberatkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dimana dalam pandangannya *governance* ialah suatu himpunan aturan, struktur dan prosedur yang memberikan beberapa kekuasaan kepada *stakeholder* untuk mempengaruhi ketetapan yang menyangkut kesejahteraan mereka. Sedangkan, Vasudha Chhotray dan Gerry Stoker (dalam Haris, 2019) menggambarkan *governance* sebagai aturan dalam pengambilan keputusan kolektif, di mana dalam pengaturan tersebut terdapat beragam aktor atau organisasi yang terlibat, tanpa adanya sistem kontrol formal yang mengatur hubungan antara aktor dan organisasi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *governance* mengacu pada mekanisme pengelolaan negara yang meliputi pengoperasian kewenangan, keterlibatan warga negara, dan interaksi berbagai intensitas politik dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks *governance* terdapat banyak konteks *multi-stakeholder*, sehingga pemerintah bukanlah satu-satunya aktor. Maka dari itu, kerjasama antar para *stakeholders* tidak dapat dihindari.

Sedarmayanti (dalam Haris, 2019) menyatakan bahwa konsep *governance* dibangun oleh tiga komponen kelembagaan, yaitu pemerintah atau negara, sektor swasta dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dimana peran pemerintah atau negara yaitu mewujudkan lingkungan politik dan hukum yang mendukung. Sektor swasta berperan menghadirkan lapangan kerja pekerjaan dan pendapat. Sementara itu, masyarakat memiliki peran dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi termasuk di dalamnya mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas politik, ekonomi dan sosial.

Gibson (dalam Bellastuti, 2020) berpendapat bahwa dalam paradigma *governance* ini terdapat banyak model yang mana setiap modelnya menawarkan penekanan yang bervariasi tergantung pada konteks lokalnya. Adapun beberapa model *governance* tersebut, yaitu:

1. *Governance as Government*

Model ini mengacu pada konsep tentang peran masyarakat, pihak ketiga dan keterlibatannya dalam proses pemerintahan yang sudah ada sejak zaman administrasi publik tradisional. Pemerintah tetap menjadi penggerak utama dalam model ini yaitu dalam hal menyatukan berbagai aktor lainnya untuk meraih tujuan pemerintahan.

2. *Good Governance*

Model ini menitikberatkan pada peran pemerintah yang esensial dalam mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan urgensi publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, kredibilitas, keterbukaan dan tanggung jawab.

3. *Governance as Good Enough Governance*

Model ini mengadvokasi mengenai pemanfaatan pendekatan bertahap dan kontinjensi dalam mencapai standar tata kelola pemerintahan yang baik, mengingat adanya keterbatasan sumber daya baik materi, waktu, wawasan serta kapasitas manusia dan organisasi. Dalam model ini tidak membicarakan terkait upaya cepat pembangunan, proses perluasan kebijakan, pelaksanaan program, penyediaan layanan atau permasalahan yang terkait dengan *good governance*.

4. *Collaborative, Partnership, Network Governance*

Model ini menitikberatkan pada pentingnya fungsi jaringan, kemitraan, kolaborasi, dan lainnya yang menunjukkan bahwa pemerintahan merupakan bagian dari keterlibatan eksternal dalam proses tersebut, bukan hanya proses internal semata.

Dalam hubungannya dengan paradigma Administrasi Publik, penelitian ini termasuk dalam paradigma administrasi publik keenam yaitu paradigma *Governance*. Karena penelitian ini menyoroti proses *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata, yang mana salah satu tipe *governance* adalah *collaborative governance*, dimana para aktor baik dari sektor publik maupun swasta bekerja sama secara khusus, melalui proses tertentu dalam menetapkan regulasi untuk menentukan tindakan publik yang optimal.

1.5.4. Manajemen Publik

Menurut Stoner dan Wankel (dalam Pasolong, 2007), manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinan, pengendalian usaha para anggota organisasi serta pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Donovan dan Jackson (dalam Pasolong, 2007) mendefinisikan bahwa manajemen yaitu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi pada tingkat tertentu yang melibatkan keterampilan dan menjadi sebagai tugas yang perlu dilaksanakan. Sedangkan, menurut Ordway Tead (1951), manajemen merupakan proses dan alat yang digunakan untuk memberikan arah dan bimbingan pada kegiatan dalam suatu organisasi agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Selanjutnya, istilah “publik” yakni merujuk kepada masyarakat atau sekelompok individu yang besar di dalam suatu negara. Menurut Mukarom, dkk (2015), publik dapat diartikan sebagai sekumpulan individu yang mempunyai kesamaan minat dan urgensi terhadap suatu masalah. Sedangkan, Syafie (2010) mendefinisikan bahwa publik merupakan sekumpulan individu yang mempunyai kesamaan dalam berpikir, merasakan harapan, sikap, serta bertindak yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut.

Overman (dalam Keban, 2004) mengatakan manajemen publik adalah suatu disiplin ilmu lintas disiplin yang mempelajari berbagai aspek umum organisasi dan merupakan kombinasi dari tugas manajemen dengan sumber daya manusia, informasi, keuangan, politik, dan fisik. Dari berbagai pandangan ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengawasan

(*controlling*) untuk melayani dan mengatasi masalah-masalah yang terdapat di publik dengan tujuan meraih target-target yang telah ditetapkan.

1.5.5. Collaborative Governance

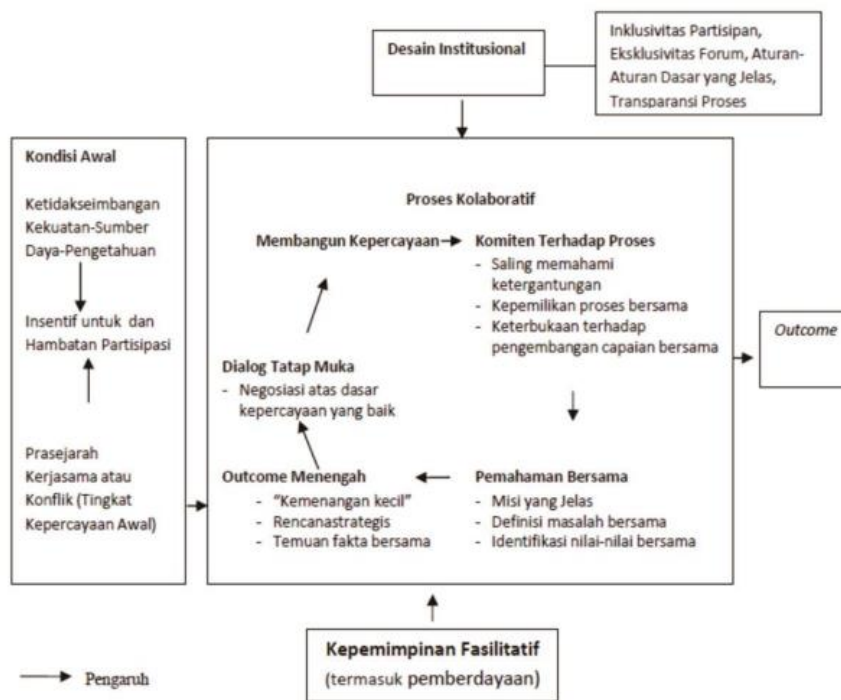
Collaborative Governance menurut Emerson, et al (dalam Molla, dkk 2021), adalah suatu proses manajemen yang terstruktur yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik untuk mencapai suatu tujuan. Karena tujuan tersebut tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Sementara itu, menurut pandangan Dwiyanto (dalam Molla, dkk 2021) dalam *collaborative governance*, terjadi komunikasi tentang visi, tujuan, dan strategi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bekerjasama, yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan secara mandiri dan mempunyai otoritas pengelolaan sesuai dengan konsesus bersama.

Ansell dan Gash berpendapat bahwa “*Collaborative Governance is a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (Ansel dan Gash, 2008). Dengan artian bahwa *collaborative governance* adalah sekumpulan peraturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik dengan aktor-aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses resmi pembuatan kebijakan, berfokus pada konsensus dan proses deliberatif, dengan tujuan untuk menciptakan atau menjalankan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik. Ansell

dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019) juga berpendapat bahwa *collaborative governance* adalah proses kerjasama atau kolaborasi yang mengikutsertakan berbagai lembaga publik dan pihak terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang tujuannya untuk menyelesaikan isu-isu publik.

Gambar 1.3

Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (dalam Tilano & Suwitri, 2019)

Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa proses kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dialog Tatap Muka (*Face to face Dialogue*)

Semua proses kolaborasi dibentuk dari dialog tatap muka secara langsung antara berbagai pihak yang terlibat. Dialog tatap muka sangat

penting untuk menemukan peluang dan keuntungan bersama. Dialog tatap muka ini bukan sekadar negosiasi biasa, melainkan dapat meningkatkan komunikasi serta mengurangi konflik dan kurangnya rasa saling menghormati antar pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama.

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kolaborasi bukan sekadar tentang negosiasi antar para pemangku kepentingan, tetapi juga melibatkan usaha untuk saling membangun kepercayaan di antara mereka. Membangun kepercayaan harus dimulai sejak awal kolaborasi dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya egosentrisme antar pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, membangun kepercayaan ini, sangat membutuhkan kehadiran pemimpin yang memahami betapa pentingnya kolaborasi.

c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen dalam proses kolaborasi tentunya memiliki keterkaitan yang erat. Komitmen adalah dorongan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam kolaborasi. Setiap pihak yang terlibat harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mengurangi risiko proses kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari setiap pemangku kepentingan agar memandang hubungan yang dijalankan sebagai sesuatu yang baru dan harus diperkuat dan dikembangkan.

d. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Pada tahap yang sama dalam proses kolaborasi, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang dapat dicapai melalui kerja sama. Pemahaman yang sama ini mencakup memiliki visi bersama, misi bersama, tujuan bersama, ideologi yang sama, objektivitas umum dan lain sebagainya. Berbagi pemahaman ini dapat memengaruhi tercapainya kesepakatan bersama dalam menafsirkan dan memahami suatu isu.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara adalah hasil dari proses kolaborasi yang dihasilkan dalam bentuk output yang dapat dilihat dan memiliki potensi pengaruh terhadap kelanjutan kolaborasi. Hasil sementara ini mampu memperkuat kepercayaan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Pada dasarnya kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama yang dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ansell dan Gash (2008) menguraikan beberapa variabel yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses *collaborative governance*, di antaranya yaitu:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah tahap awal dalam membentuk hubungan, di mana aktor-aktor dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna mencapai visi dan tujuan

bersama. Tahapan ini terdiri dari tiga aspek yaitu ketimpangan kekuasaan atau pengaruh *stakeholder*, pengetahuan, sumber daya, sejarah terkait kerjasama atau konflik antar *stakeholder*, dorongan dan hambatan dalam kolaborasi.

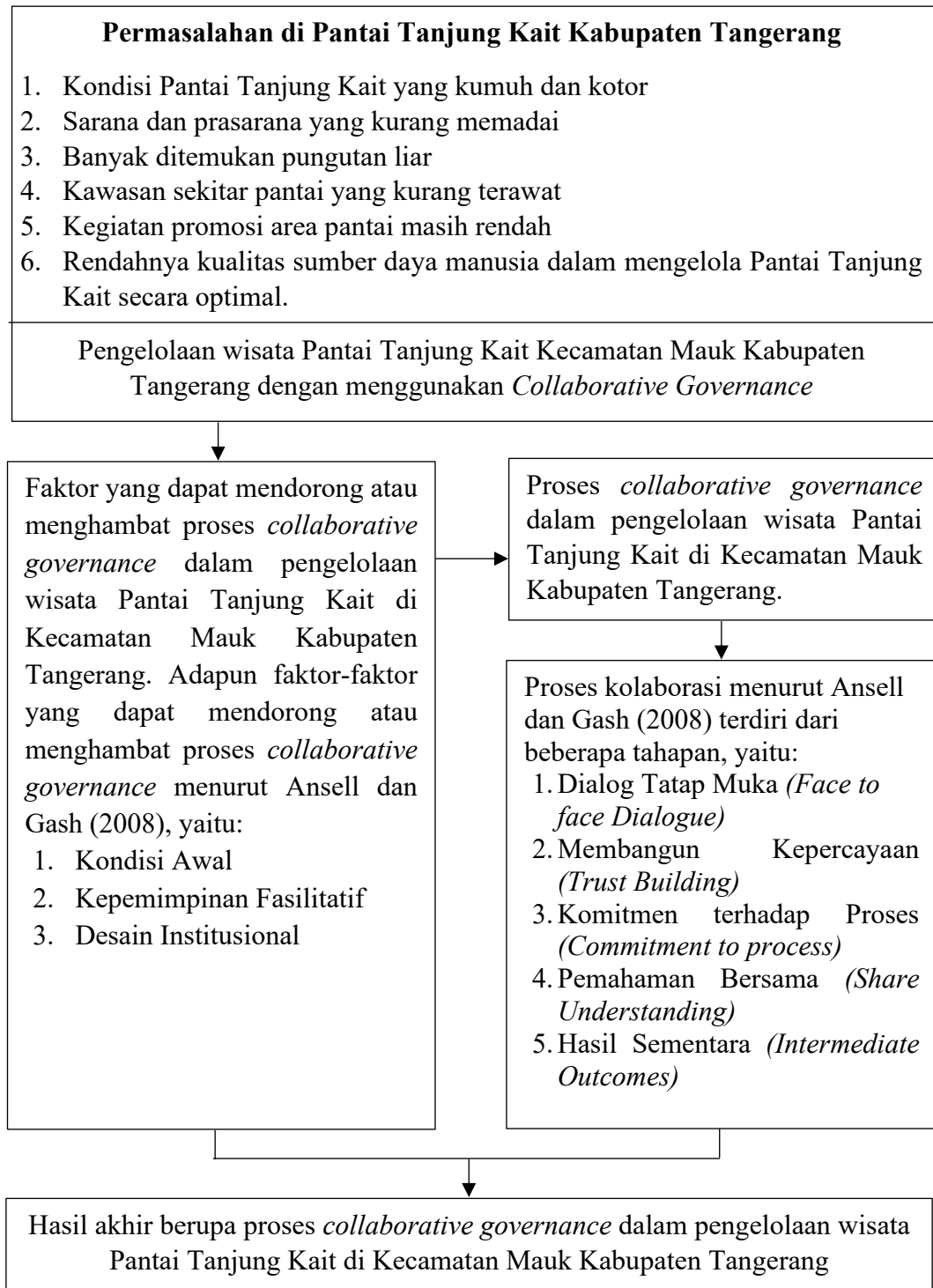
2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen utama dalam *collaborative governance*, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai konsensus mengenai kejelasan peraturan, membangun kepercayaan, berbagi keuntungan bersama, dan memberdayakan mereka.

3. Desain Institusional

Desain institusional mencakup kerangka peraturan yang ada dalam kolaborasi dan telah disetujui oleh semua aktor yang terlibat. Keberhasilan kolaborasi akan tercapai apabila seluruh aktor merasakan dampaknya dan memperhatikan isu yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan transparansi, di mana para pemangku kepentingan memiliki keyakinan bahwa proses tersebut setara, menyeluruh, dan transparan.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu tahapan dimana peneliti menjelaskan konsep atau variabel penelitian secara menyeluruh. Dalam hal ini, operasionalisasi konsep berarti peneliti memberikan penjelasan tentang arti dari konsep utama yang digunakan serta kemungkinan-kemungkinan dalam mengoperasionalsikannya. Konsep *collaborative governance* digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. *Collaborative governance* merupakan suatu kerja sama yang dijalankan oleh pemerintah dengan masyarakat dan atau aktor non-pemerintah dalam mengambil keputusan guna mengatasi masalah publik.

Penelitian ini berfokus pada fenomena yang akan diteliti yaitu mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Untuk menganalisis fenomena proses *collaborative governance* ini lebih lanjut, peneliti akan menggunakan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dialog tatap muka
 - Adanya kegiatan musyawarah yang melibatkan para aktor untuk membahas kolaborasi yang dilakukan
- 2) Membangun kepercayaan
 - Adanya transparansi dalam setiap tahap kolaborasi untuk membangun kepercayaan antar para aktor

3) Komitmen terhadap proses

- Adanya tujuan yang sama antar para aktor
- Adanya keterlibatan aktif para aktor dalam proses kolaborasi bersama

4) Pemahaman bersama

- Adanya kejelasan visi, misi dan tujuan bersama dalam kolaborasi

5) Hasil sementara

- Adanya capaian sementara yang dihasilkan
- Adanya pembentukan rencana strategis

Adapun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, digunakan beberapa faktor menurut oleh Ansell dan Gash, yaitu:

1) Kondisi Awal

- Adanya pembentukan relasi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta terkait kolaborasi pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait
- Adanya pembentukan visi dan tujuan bersama para aktor
- Adanya faktor pendorong bagi para aktor untuk ikutserta dalam kolaborasi

2) Kepemimpinan Fasilitatif

- Adanya pemberian bimbingan kepada para aktor yang terlibat

3) Desain Institusional

- Adanya penetapan aturan dasar
- Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian menguraikan terkait apa, mengapa, dan bagaimana suatu permasalahan diteliti dengan memakai prinsip-prinsip metodologis yang telah dibicarakan sebelumnya. Ada tiga desain atau metode penelitian antara lain metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dan penelitian campuran. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian di bidang sosial yang mengimplementasikan pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan berbagai situasi, kondisi atau fenomena sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan realitas tersebut sebagai ciri, model, sifat, karakteristik, tanda atau gambaran situasi, kondisi atau fenomena tertentu, (Bungin, 2007:68). Dengan mengacu pada definisi tersebut, penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan secara objektif data yang ada di lapangan dan mendapatkan informasi tentang keadaan saat ini. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan “bagaimana” untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs Penelitian adalah lokasi atau tempat dimana penelitian berlangsung. Adapun situs penelitian ini yaitu berada di Pantai Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang sebagai lokus penelitian dalam meneliti proses

collaborative governance dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden atau individu yang membagikan informasi. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian juga dapat disebut sebagai informan, yakni mengacu kepada individu yang membagikan informasi yang relevan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, Fitrah (dalam Isro, 2021). Di dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih dengan memakai metode *Snowball Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang melibatkan bantuan informan kunci. Dari informan kunci ini, peneliti akan memperoleh informasi yang lebih luas sesuai dengan arahan dan petunjuknya. Menurut Sugiono (2008), informan kunci ini dianggap sebagai orang yang paling mengetahui terkait fenomena atau masalah yang sedang diteliti atau orang tersebut berperan sebagai tokoh yang memiliki pengaruh sehingga akan membantu peneliti dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap objek atau situasi yang sedang diteliti.

Adapun subjek dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang
2. Kepala Desa Tanjung Anom
3. Kelompok Sadar Wisata Pantai Tanjung Kait
4. Swasta (PT PLN UID Banten)
5. Masyarakat pelaku UMKM

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang berarti data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, gambar atau skema, bukan dalam bentuk angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, analisis dokumen, atau observasi yang ditulis dalam transkrip, Indah (dalam Adelina, 2019). Penelitian mengenai proses *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang terkait dengan data yang dikumpulkan juga dipresentasikan dalam bentuk kalimat, skema, gambar yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

1.8.5. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Melly, 2020), data seperti dokumen dan sebagainya adalah sumber data tambahan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber atau lokasi penelitian. Data primer adalah data sensus karena dikumpulkan, diolah dan diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, Pasolong (dalam Melly, 2020). Adapun dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara dengan para informan yang terdiri Disporabudpar Kabupaten Tangerang, Pemerintah Desa Tanjung Anom, Kelompok Sadar Wisata Pantai Tanjung Kait dan swasta (PT PLN UID Banten) dan masyarakat pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder biasanya merupakan hasil dari penelitian lain atau yang sudah diolah sebelumnya, Pasolong (dalam Melly, 2020). Berikut ini merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Perundang-undangan mengenai pariwisata, perundang-undangan mengenai pemerintah daerah, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 108 Tahun 2016, Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, data BPS Kabupaten Tangerang, data BPS Provinsi Banten, dan data dari Disporabudpar Kabupaten Tangerang. Data sekunder tersebut dimanfaatkan untuk mengarahkan penelitian ini.
- b. Data hasil penelitian terdahulu yang membicarakan tentang proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana kita mengajukan pertanyaan kepada individu yang berperan sebagai informan atau responden, Sugiyono (2008:240). Wawancara ini dilakukan secara langsung atau tatap muka untuk melakukan tanya jawab dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Observasi adalah proses

pengamatan yang dilaksanakan secara langsung dan terstruktur terhadap gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian, Sugiyono (2012:204). Selain observasi, teknik pengumpulan data yang juga dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumber atau tempat penelitian dilakukan. Dokumen yaitu bisa berupa berbagai catatan peristiwa yang telah terjadi, seperti peraturan-peraturan atau regulasi, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan untuk penelitian (Riduwan, 2013).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah suatu proses pengolahan dan penyusunan data secara terstruktur yang didapatkan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti mengkategorikan data, menguraikan data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, mengidentifikasi ke dalam pola, memprioritaskan hal-hal yang harus dipelajari, serta menarik kesimpulan sehingga dapat dimengerti oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2009). Penelitian ini mengadopsi model analisa data dari Huberman dan Miles yang disebut model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246), proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai. Terdapat tiga alur utama dari model ini, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu melibatkan proses perangkuman informasi, memilih elemen-elemen yang dianggap esensial, dan memfokuskan pada aspek yang penting sehingga mendapatkan

gambaran yang lebih terfokus dan dapat memudahkan proses pengumpulan data berikutnya dan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang dilakukan secara struktur dan mudah dimengerti sehingga dapat mempermudah dalam hal pemahaman dan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan yaitu dengan menganalisis bukti-bukti yang valid sehingga hal ini dapat memastikan bahwa penarikan kesimpulan terkait kesesuaian data dalam konsep dasar analisis telah dilakukan dengan objektif dan tepat.

1.8.8. Kualitas Data atau Validitas Data

Validitas data adalah tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan fakta di lapangan. Menurut Creswell dan Miller, validitas dalam penelitian kualitatif bergantung pada seberapa akurat hasil penelitian dari perspektif peneliti, partisipan, atau pembaca secara keseluruhan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup uji *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas), (Sugiyono, 2015:120).

Penelitian ini mengimplementasikan teknik triangulasi sumber untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Triangulasi sumber adalah uji validitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai

sumber yang berbeda. Teknik ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, seperti Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, Pemerintah Desa Tanjung Anom, Kelompok Sadar Wisata Pantai Tanjung Kait, swasta (PT PLN UID Banten), masyarakat pelaku UMKM. Dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara ini dapat memperjelas hasil temuan di lapangan.